

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Dalam penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan hasil Musrenbang Provinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang akan dioperasionalkan pada kurun waktu tahun 2016, merupakan komitmen aparat Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dalam rangka ikut menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang terus berkembang serta sekaligus mengatur arah perkembangan guna meningkatkan keberhasilan di masa mendatang.

Rencana Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat akan merupakan sarana operasional dalam mewujudkan tugas pokok yang diembannya, yaitu dalam rangka perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebinamargaan. Oleh karenanya, Rencana Kerja ini merupakan perwujudan dari suatu komitmen penuh seluruh jajaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Dalam tahap implementasi, amanat yang digariskan dalam Rencana Kerja ini, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, disamping sikap konsisten seluruh jajaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat terhadap komitmen tersebut di atas.

Tercapainya pelayanan prasarana jalan melalui program pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan maupun rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan penekanan target dan sasaran untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan dan jembatan.

Dalam pelaksanaan rencana kerja 2016 diprediksi terdapat beberapa hambatan baik internal maupun eksternal, yaitu:

a. Kendala Internal

- Masih terbatasnya peralatan untuk pemeliharaan jalan.
- Adanya keterbatasan wewenang dalam pengawasan dalam pemanfaatan jalan seperti muatan lebih.

b. Kendala Eksternal

- Untuk ruas-ruas jalan tertentu, terutama ruas jalan yang termasuk akses terhadap lokasi sumber quarry (Galian C), beban lalu lintas yang ada sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST) dari 2 sampai 3 kalinya.
- Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat beban muatan lebih (*excessive over loading*), berakibat pada rusaknya jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai
- Terjadinya banjir/bencana alam, hal ini salah satunya disebabkan oleh penebangan pohon atau penebangan hutan secara liar, sehingga air permukaan tidak bisa ditampung pada saluran drainase yang ada,
- Masih kurangnya pengertian warga masyarakat akan peran dan fungsi bagian-bagian jalan antara lain membuat bangunan diatas saluran jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan, pasar tumpah, parkir dan lain-lain.
- Dalam pengawasan pemanfaatan jalan terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu banyak Ruang Milik Jalan pada arteri dan kolektor primer dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima (PKL), rumah dan kegiatan lainnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan penanganan jalan diantaranya adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap kelebihan Standar Muatan Sumbu Terberat (MST).
2. Diperlukan perencanaan program yang terintegrasi dengan sektor lainnya dan dilaksanakan secara menyeluruh (ruas)

3. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat akan peran dan fungsi jalan.
4. Memaksimalkan peralatan yang ada dan berusaha menambah peralatan sesuai dengan kebutuhan.
5. Dalam tahapan perencanaan, biaya penanganan diperhitungkan sesuai dengan tingkat kebutuhan prioritas penanganan dengan memperhitungkan kondisi dan faktor lingkungan.
6. Melakukan inventarisasi/sertifikasi, risalah-risalah pembebasan tanah dan bukti-bukti penyerahan tanah dari Pusat/Daerah yang dikuasai oleh Dinas Bina Marga.

Dengan selesainya Renja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renja ini, yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan RAPBD.

L A M P I R A N